

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya memerlukan anggaran sebagai landasan yang dapat membantu mewujudkan kegiatan dan program-program yang telah disusun demi kesejahteraan rakyat. Anggaran tersebut berasal dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) yang sebelumnya telah dirancang oleh pemerintah daerah dan dimuat dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Anggaran dalam lingkup pemerintah daerah merupakan tulang punggung bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Anggaran dikatakan sangat penting karena anggaran menjadi alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, penyelenggaraan, dan pengendalian organisasi maupun penilaian kinerja. Kinerja adalah hasil pekerjaan dalam kualitas dan jumlah yang dapat diselesaikan oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya.

Pertanggungjawaban atau pelaporan atas kinerja belanja tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun harus didukung juga dengan laporan keuangan secara tertulis. Dengan adanya laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai, maka laporan tersebut harus disajikan tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib untuk membuat dan melaporkan kondisi keuangan di daerah. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan. Dalam struktur APBD, belanja langsung menjadi salah satu komponen utama yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu belanja langsung operasional dan belanja langsung modal, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga pemerintahan daerah yang memiliki fungsi merencanakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Bengkalis memiliki anggaran untuk melaksanakan belanja, terdapat 2 jenis belanja yaitu belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional berfungsi untuk menopang sarana-prasarana, jasa, dan belanja pegawai guna mendukung kinerja dalam melaksanakan program yang telah dirancang. Maka dari itu diperlukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan ke depan.

Belanja Modal direalisasikan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Kebijakan belanja diarahkan agar dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian RPJPD, RPJMD, dan RKPD TA 2020 dimana perencanaan dalam APBD TA 2020 mempedomani hal-hal berikut :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah pada Bappeda Kabupaten Bengkalis dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang merupakan salah satu pertanggungjawaban dari laporan keuangan per tahunnya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali nya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri.

Tabel 1. 1.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2019	25.895.714.761	21.947.263.370	-	21.947.263.370
2020	22.074.111.226	19.848.001.661	-	19.848.001.661
2021	33.373.044.295	25.172.402.933	-	25.172.402.933
2022	32.333.482.417	28.822.145.389	-	28.822.145.389
2023	29.704.530.690	26.318.558.572	-	26.318.558.572

Sumber : Badan Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Bengkalis tahun 2019 hingga 2023, tercatat bahwa alokasi anggaran belanja menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, namun dengan tingkat realisasi yang cenderung tinggi. Pada tahun 2019, alokasi anggaran belanja mencapai Rp25.895.714.761, dengan realisasi sebesar Rp21.947.263.370. Sementara pada tahun 2020, terjadi penurunan alokasi menjadi Rp22.074.111.226, dan realisasi mencapai Rp19.848.001.661. Pada tahun 2021, alokasi anggaran meningkat tajam menjadi Rp33.373.044.295 dengan realisasi Rp25.172.402.933. Selanjutnya, tahun 2022 dan 2023 mencatat realisasi masing-masing sebesar Rp28.822.145.389 dan Rp26.318.558.572 dari total anggaran sebesar Rp32.333.482.417 dan Rp29.704.530.690. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Bengkalis memiliki kemampuan dalam menyerap anggaran dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka penelitian ini berjudul “Implentasi Belanja Langusung Dinas Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis”. Penulis berharap dengan melakukan penelitian dan pengamatan ini maka penulis dapat mengetahui kesesuaian Penerapan belanja langsung yang ada di Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah uraikan, penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis?
2. Apakah implementasi belanja langsung tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020?
3. Apa saja faktor-faktor yang pendukung dan menghambat implementasi belanja langsung di BAPPEDA Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, batasan masalah penelitian ini difokuskan pada implementasi belanja langsung yang terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja langsung selama tahun anggaran tertentu serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan deskripsi dan interpretasi yang komprehensif.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi belanja langsung operasional dan belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui implementasi belanja langsung tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi belanja langsung di BAPPEDA Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui implementasi belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis khususnya belanja operasional dan modal dan kebijakan anggaran, terutama dalam konteks belanja langsung pada instansi pemerintahan daerah.

- b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait kebijakan anggaran, terutama dalam konteks belanja langsung pada instansi pemerintahan daerah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pengelolaan belanja langsung, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, teknik pengelolaan data, metode analisis data, jenis penelitian yang telah digunakan dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN